

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Tesis

Oleh :



**PASCASARJANA ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

EKALIA YUNIZA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING THE RETRIBUTION INCOME FROM PUBLIC ROADSIDE PARKING SERVICE IN BANDAR LAMPUNG

By

EKALIA YUNIZA

The purpose of this study is to determine the factors which cause failure in achieving target, the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita (*Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) per kapita), the number of vehicles ownerships as well as inflation toward retribution income from public roadside parking service in Bandar Lampung. The data used is the realization of retribution from parking services, GRDP per capita, the number of vehicle ownership, and inflation of Bandar Lampung. Data sourced from the Provincial Revenue Office of Lampung, District Revenue Office of Bandar Lampung, Central Bureau of Statistics Bandar Lampung, and Department of Transportation Bandar Lampung Year 2008-2014.

Based on the results of the study, The income from parking retribution fees generally does not reach the target due to some aspects: parking officers indisciplinary, the lack of control and consequences, changes of land use for parking, the lack of proper parking facilities and infrastructure, the leakage of parking retribution caused by parking attendants or parking area users, weather conditions such as rain, and holidays when most stores are not operating. Data analysis using multiple linear regression analysis after the classic assumption test conducted. Based on the results of regression, Gross Domestic Regional Product (GRDP) per capita and the number of vehicle ownership has significant and positive effect on the total income from Public Roadside Parking Service, where inflation has positive yet not significant effect to the total revenue of Public Roadside Parking Service.

The author recommends the Government of Bandar Lampung to organize parking areas on the side of the public roads, improving controls on the field, propose formal registration to Department of Transportation for the officers to minimize illegal parking, reduce the leakage of parking retribution by increasing monthly incentive for parking officers, raise the parking rates to increase Locally Generated Revenue and reduce traffic jam as well, using online computerized system which is used by private companies.

Key word : retribution income from public roadside parking service, GRDP per capita, the number of vehicle ownership, and inflation

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

EKALIA YUNIZA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya target, pengaruh PDRB perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, serta inflasi terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan adalah realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, PDRB perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan inflasi Kota Bandar Lampung. Data bersumber dari Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung, BPS Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2014.

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum tidak mencapai target disebabkan oleh belum tertibnya petugas juru parkir, kurangnya pengawasan dan penetapan sanksi yang tegas, alih fungsi lahan parkir, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan parkir yang memadai, alih fungsi lahan parkir, kebocoran penerimaan parkir baik dari pihak juru parkir atau pihak pengguna jasa parkir, keadaan cuaca misalnya hujan, dan hari libur yang kebanyakan toko-toko tidak menjalankan aktivitasnya. Analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda dan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan hasil regresi, PDRB perkapita dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap total penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, sedangkan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap total penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.

Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menertibkan wilayah parkir di tepi jalan umum, meningkatkan pengawasan di lapangan, mendaftarkan secara resmi petugas juru parkir ilegal, mengurangi kebocoran penerimaan retribusi parkir dengan memberikan sistem penggajian yang

diberikan per bulan kepada petugas juru parkir, menaikkan tarif parkir dengan tujuan agar PAD dapat meningkat namun dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di tepi jalan umum, dan serta sebaiknya menggunakan sistem yang pernah dikelola oleh pihak swasta dengan sistem komputerisasi on line.

Kata Kunci : Penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, PDRB perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan inflasi

Judul Tesis : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ekalia Yuniza**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1321021011

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I,

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suparta".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saimul".

Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP 19611209 198803 1 003

Dr. Saimul, S.E., M.Si.
NIP 19600918 198703 1 002

2. Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suparta".

Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP 19611209 198803 1 003

MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji :

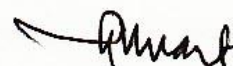
1.1. Ketua

: **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**



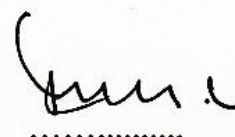
1.2. Penguji Utama

: **Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.**



1.3. Sekretaris

: **Dr. Saimul, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 20 April 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya peneliti lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan, serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2016



Ekalia Yuniza
NPM. 1321021011

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Tesis ini adalah Ekalia Yuniza, dilahirkan di Tanjungkarang pada tanggal 11 Juni 1974, merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Zainuddin Hasan dan Rijlawati. Peneliti telah menikah dengan Asrul Sani Setiawan, SH, MH, pada tanggal 03 Juni 2000 di Kota Bandar Lampung.

Peneliti memulai pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kaliawi Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan lulus pada tahun 1987, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Tanjungkarang dan lulus pada tahun 1990, setelah itu melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 2 Tanjungkarang dan lulus pada tahun 1993. Peneliti melanjutkan ke jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Sumberdaya Manusia dan lulus pada tahun 1997.

Pada Tahun 2013, peneliti melanjutkan studi ke jenjang Strata Dua (S2) dan terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Peneliti hingga saat ini masih aktif bekerja di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai Kepala Seksi Industri Hasil Perikanan dan Peternakan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

MOTO

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
(QS. Al Baqarah: 185)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh
(Confusius)

Bukan kurangnya pengetahuan yang menghalangi keberhasilan, tetapi tidak cukupnya tindakan. Dan bukan kurang cerdasnya pemikiran yang melambatkan perubahan hidup ini, tetapi kurangnya penggunaan dari pikiran dan kecerdasan
(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada :

Ayah dan ibundaku tercinta atas segala limpahan kasih sayang, cinta, doa, kesabaran, dukungan, dan ketulusan yang selalu diberikan kepadaku yang sampai kapan jua tak mampu terbalaskan.

Suamiku tersayang Daing Asrul Sani Setiawan, SH, MH, atas segala cinta kasih, dukungan, dan kesempatan yang diberikan kepadaku, aku hanyalah wanita biasa yang ingin sukses pada rumah tangga dan karirku, serta berusaha menjadi istri yang sholehah.

Buah hatiku, Shyna Risha Intan Muli, Shadinda Madjar Putri, Syauqie Muhammad Alam Ratu, dan Syaiza Muhammad Putra Alam yang telah mendukung dan menjadi penyemangat bagi Mama untuk meraih cita-cita dan kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anakku tersayang, kalian adalah anugerah terindah dalam hidup Mama, semoga karya Mama ini bisa membuat kalian bangga dan semoga hidup kalian bisa lebih sukses daripada Mama. Amin Ya Robbal Alamin.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya peneliti lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan, serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2016



Ekalia Yuniza
NPM. 1321021011

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak baik secara moril maupun materiil, dan dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, serta selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, masukan, dan motivasi berharga kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini
4. Bapak Dr. Saimul, S.E., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran, masukan, dan motivasi berharga kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini
5. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku pembahas dan penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti pada penyelesaian tesis ini
6. Ibu Marselina Jayasinga, S.E., MPM., selaku pembahas draft tesis dalam seminar yang telah memberikan bimbingan, saran-saran perbaikan, dan kritik membangun pada penyelesaian tesis ini
7. Para Dosen Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang sangat berharga bagi peneliti. Serta staf administrasi Magister Ilmu Ekonomi Unila
8. Pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, BPS Kota Bandar Lampung, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung, dan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
9. Kedua orang tuaku yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan aku semangat untuk menyelesaikan tesis ini, begitu juga kepada kedua mertuaku yang telah memberikan motivasi dan nasihat kepadaku
10. Asrul Sani Setiawan, SH, MH, suamiku tersayang yang telah mendukung selama perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini

11. Shyna Risha Intan Muli, Shadinda Madjar Putri, Syauqie Muhammad Alam Ratu, dan Syaiza Muhammad Putra Alam yang telah mendukung dan menjadi penyemangat bagi Mama untuk meraih cita-cita dan kesuksesan di masa yang akan datang.
12. Uni, kakak, adik, dan saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat untuk penyelesaian tesis ini.
13. Seluruh sahabat-sahabat Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2013 yang telah mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, amin.

Bandar Lampung, April 2016

Peneliti,

Ekalia Yuniza
NPM. 1321021011

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Halaman Judul.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Riwayat Hidup	viii
Halaman Persembahan	ix
Motto	x
Pernyataan Tesis Mahasiswa	xi
Sanwacana.....	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian	20
D. Ruang Lingkup Masalah.....	20
E. Kerangka Pemikiran.....	22
F. Hipotesis Penelitian	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
1. Pajak Daerah.....	28
2. Retribusi Daerah	30
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38
B. Laju Pertumbuhan, Kontribusi, dan Potensi Retribusi Daerah ...	38
C. Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.....	42

D. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	44
E. Produk Domestik Regional Bruto.....	54
F. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	60
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	64
A. Jenis Data dan Sumber Data	64
B. Teknik Pengumpulan Data	65
C. Metode Pengolahan Data.....	66
D. Spesifikasi Model Analisis.....	68
E. Regresi Linier Berganda	69
1. Metode Regresi Linier Berganda (OLS).....	69
a. Uji Normalitas	70
b. Uji Multikolinieritas	71
c. Uji Autokorelasi	72
d. Uji Heterokedastisitas	74
2. Pengujian Parameter	75
3. Uji kelayakan Model.....	76
a. Uji F.....	76
b. Uji t	77
F. Definisi Operasional Variabel.....	79
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	81
A. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	81
B. Analisis Inferensia	99
1. Hasil dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik.....	100
a. Hasil Uji Normalitas	100
b. Uji Multikolinieritas	101
c. Uji Autokorelasi	102
d. Uji Heterokedastisitas	103
2. Estimasi Model Ordinary Least Square (OLS).....	104
3. Uji kelayakan Model.....	105
a. Uji F.....	105
b. Uji t	106
C. Pembahasan	107
D. Analisis Deskriptif Kualitatif	109
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	113
A. Simpulan	113
B. Saran	115

Daftar Pustaka... ..

Lampiran... ..

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014.....	4
1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008- 2014.....	5
1.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014	8
1.4 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014	9
1.5 Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014	10
1.6 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung Tahun 2008 – 2014	12
1.7 PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014	13
1.8 Jumlah Laju Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014	14
1.9 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	15
1.10 Tarif Retribusi Parkir Berlangganan di Kota Bandar Lampung	16
1.11 Perkembangan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung	17
1.12 Jumlah Petugas Juru Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014	18

2.1	Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung	46
2.2	Tarif Retribusi Parkir Berlangganan di Kota Bandar Lampung	47
2.3	Wilayah Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung	49
2.4	Perkembangan Penetapan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung	53
2.5	Penelitian Terdahulu	62
4.1	Panjang Ruas jalan di Lokasi Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	83
4.2	Perbedaan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung	85
4.3	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum oleh PT MBP Lampung	87
4.4	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan di Kota Bandar Lampung	89
4.5	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Setelah dikelola PT. MBP Lampung	91
4.6	Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan Roda Empat di Lokasi Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	95
4.7	Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan Roda Dua di Lokasi Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	95
4.8	Jumlah Penerimaan Bersih Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Lokasi Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	96
4.9	Estimasi Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Selama Satu Minggu di Lokasi Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	97

4.10 Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Lokasi Pasar Tengah Kota Bandar Lampung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	98
4.11 Selisih Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Selama Satu Minggu	99
4.12 Hasil Uji Multikolinieritas	102
4.13 Hasil Uji Autokorelasi dengan lag 1	103
4.14 Hasil Uji Heterokedastisitas Cross Times	103
4.15 Hasil Uji Heterokedastisitas Cross Times	104
4.16 Hasil Estimasi OLS	105
4.17 Hasil Uji F Statistik pada Model OLS	106
4.18 Hasil Uji t Statistik pada Model OLS	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Trend PAD Kota Bandar Lampung	6
1.2. Trend Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2008 - 2014	11
1.3. Kerangka Pemikiran	24
4.1 Denah Lokasi Ruas Jalan di Lingkungan Pasar Tengah Kota Bandar Kerangka Pemikiran	82
4.2. Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir oleh PT. MBP Lampung	88
4.3. Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung	90
4.4. Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Setelah dikelola oleh PT. MBP Lampung	92
4.5. Hasil Uji Normalitas	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi dan nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah membantu pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan. Untuk merealisasikan

pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat, oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Suatu daerah otonom dikatakan mampu berotonomi apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun

dan belanjanya tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD yang ada didaerahnya berdasarkan dari empat penggolongan tersebut diatas. Selanjutnya peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa daerah Kabupaten/ Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Upaya dalam peningkatan pendapatan oleh setiap pemerintah haruslah didukung dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Sebagai daerah otonom, Kota Bandar Lampung dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD

secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 960.695 juta jiwa merupakan potensi dalam penerimaan retribusi daerah. Jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2008 – 2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan (%)
2008	822,880	1,32
2009	833,517	1.29
2010	881,801	5.79
2011	891,374	1.09
2012	902,885	1.29
2013	942,039	4.34
2014	960,695	1.98

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2015

Membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada.

Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya.

Selanjutnya Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) telah menguraikan bahwa: Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

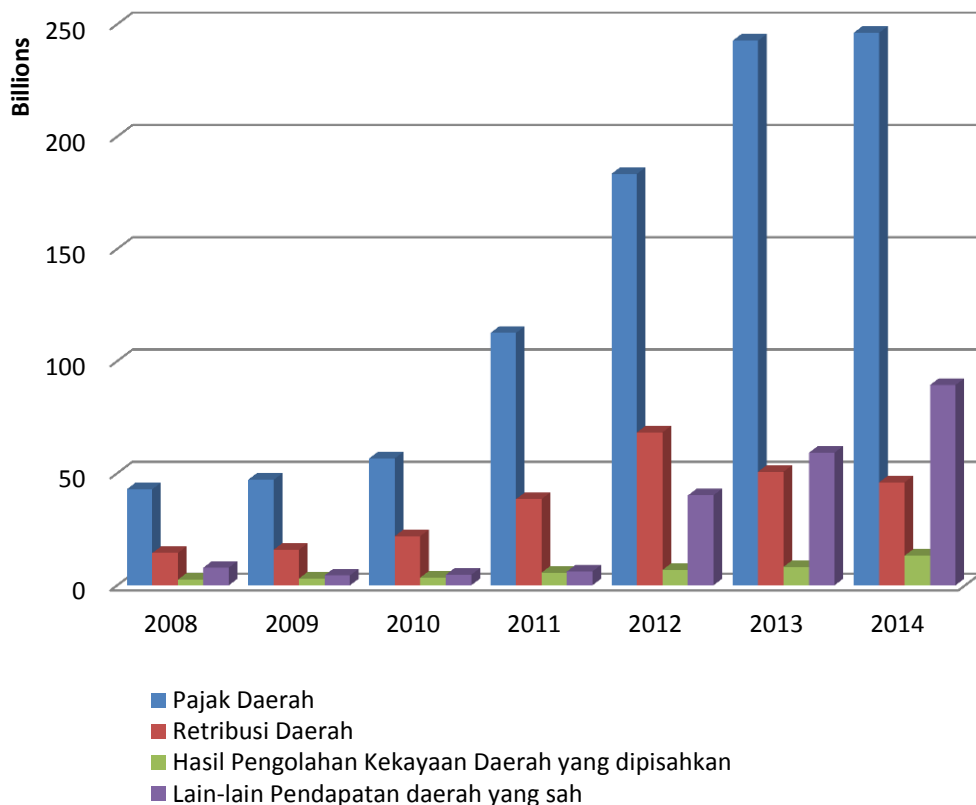
Pada Tabel 1.2 dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Total PAD
2008	42.841.374.876,00	14.414.767.716,00	2.509.144.000,00	7.896.232.429,92	67.661.519.021,92
2009	47.035.295.283,00	15.849.094.531,00	3.087.055.409,20	4.460.818.945,08	70.432.264.168,28
2010	56.627.114.786,48	21.911.781.739,00	3.449.399.341,17	4.704.103.833,76	86.692.399.700,41
2011	112.557.355.470,00	38.431.095.234,00	5.631.089.632,00	6.198.579.220,88	162.818.119.556,88
2012	183.436.575.291,26	68.252.030.150,00	6.862.738.923,00	40.144.717.721,23	298.696.062.085,49
2013	242.651.752.332,18	50.651.293.897,32	8.237.246.269,54	59.158.057.632,84	360.698.350.131,88
2014	246.167.925.212,95	45.920.496.941,00	13.206.503.301,24	89.351.963.991,40	394.646.889.446,59

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, 2015

Perkembangan penerimaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 yang bersumber dari pajak daerah dan sumber hasil pengolahan kekayaan daerah cenderung meningkat, namun penerimaan dari sumber retribusi daerah dan sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari penerimaan sebesar Rp 38.431.095.234,00 menjadi Rp 68.252.030.150,00. Pada tahun 2013 penerimaan dari sumber retribusi daerah menurun dari Rp 68.252.030.150,00 pada tahun 2012 menjadi Rp 50.651.293.897,32 pada tahun 2013 dan terus menurun pada tahun 2014 menjadi Rp 45.920.496.941,00.



Gambar 1.1. Trend PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2008 – 2014

Gambar 1.1 memperlihatkan trend perkembangan PAD Kota Bandar Lampung. Dari keempat sumber PAD tersebut pajak daerah mengalami kecenderungan meningkat, sejak tahun 2011 penerimaan pajak daerah meningkat dengan pesat dari tahun sebelumnya.

Retribusi daerah mengalami laju peningkatan dari tahun sebelumnya sampai pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 sampai 2014 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah. Sumber PAD dari sektor hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami laju kenaikan yang lambat, sedangkan sumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dan pada tahun 2012 mengalami laju peningkatan yang pesat dari tahun sebelumnya dan terus meningkat sampai tahun 2014.

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat diketahui bahwa pencapaian penerimaan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi dan diantara keempat sumber PAD tersebut, sumber dari sektor retribusi daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Apabila dilihat dari pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung maka pencapaian realisasi terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 104,08% dan pencapaian terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 55,48%.

Tabel 1.3 menyajikan data laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung pada tahun 2008 sampai dengan 2014, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah di

Kota Bandar Lampung dibandingkan penerimaan pada tahun 2012 dengan laju pertumbuhan -25,79%. Laju pertumbuhan tertinggi diperoleh pada tahun 2012 sebesar 77,60%.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008–2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)
2008	15,665,936,560.00	14,414,767,716.00	92.01	15,01
2009	16,855,236,600.00	15,849,094,531.00	94.03	9.95
2010	23,835,907,380.00	21,911,781,739.00	91.93	38.25
2011	36,924,709,551.50	38,431,095,234.00	104.08	75.39
2012	80,530,077,780.25	68,252,030,150.00	84.75	77.60
2013	74,053,787,912.50	50,651,293,897.32	68.40	-25.79
2014	82,774,131,500.00	45,920,496,941.00	55.48	-9.34

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, 2015

Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.4. Kontribusi retribusi daerah yang disumbangkan untuk PAD Kota Bandar Lampung berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 21,84%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 21.911.781.739,- atau 25,28% dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 45.920.496.941,- atau 9,41%.

Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.4. Kontribusi retribusi daerah yang disumbangkan untuk PAD Kota Bandar Lampung berfluktuasi, kontribusi tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 21.911.781.739,- atau 25,28% dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 45.920.496.941,- atau 9,41%.

Tabel 1.4 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2008	14,414,767,716.00	67,661,519,021.92	21.30
2009	15,849,094,531.00	70,432,264,168.28	22.50
2010	21,911,781,739.00	86,692,399,700.41	25.28
2011	38,431,095,234.00	162,818,119,556.88	23.60
2012	68,252,030,150.00	298,696,062,085.49	22.85
2013	50,651,293,897.32	360,698,350,131.88	14.04
2014	45,920,496,941.00	394,646,889,446.59	11.64

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2015

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui salah satunya penerimaan retribusi daerah yaitu penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Pengelolaan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung sangat potensial, hal ini disebabkan Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan sebagai kota wisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah ditugaskan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Pada Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa pencapaian penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terhadap target yang ditetapkan terus

berfluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Pencapaian penerimaan terhadap target paling tinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 1.370.895.500,- atau 97,92% dan paling kecil terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 2.277.058.500,- atau 56,93%.

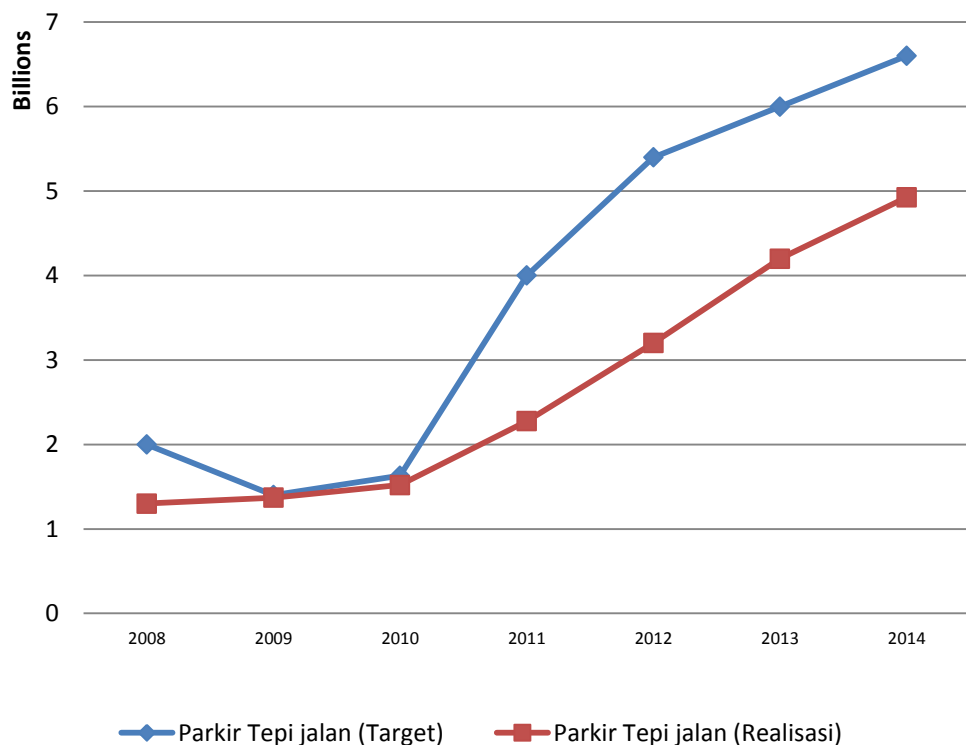
Tabel 1.5 Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Tahun 2008-2014

Tahun	Parkir Tepi jalan		Pertumbuhan (%)	Pencapaian Target (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2008	2,000,000,000	1,299,902,000	11,53	65.00
2009	1,400,000,000	1,370,895,500	5.46	97.92
2010	1,630,000,000	1,520,247,000	10.89	93.27
2011	4,000,000,000	2,277,058,500	49.78	56.93
2012	5,400,000,000	3,201,489,000	40.60	59.29
2013	6,000,000,000	4,200,000,100	31.19	70.00
2014	6,600,000,000	4,925,028,400	17.26	74.62

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2015

Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dari tahun 2008 meningkat sampai tahun 2009 yaitu dari Rp 1.299.902.000 atau 65% menjadi Rp 1.370.895.500 atau 97,92%, kemudian penerimaan retribusi parkir menurun pada tahun 2010 sebesar Rp 1.520.247.000 atau 93,27%, dan penerimaan terus menurun pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 2.277.058.500,- atau 56,93%. Pada tahun 2012 sampai 2014 penerimaan terus meningkat sampai mencapai 74,62% pada tahun 2014. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum tidak pernah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 mengalami laju pertumbuhan yang lambat dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai tahun 2014 walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 1.2. Trend Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2008 – 2014

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum juga tidak terlepas dari jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang ada diwilayahnya. Kendaraan bermotor ini terdiri dari angkutan penumpang (sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya), angkutan barang jenis box, bus, truck, truck gandeng, trailer kontainer, sepeda motor, dan lain sebagainya.

Selanjutnya Tabel 1.6 menyajikan data kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat di Kota Bandar Lampung berdasarkan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Tabel 1.6 Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung Tahun 2008 – 2014

Tahun	Mobil Penumpang	Mobil Beban (Box)	Mobil Bus/Truck	Truck Gandeng	Sepeda Motor	Jumlah
2008	48,122	18,341	598	169	256,624	323,854
2009	31,809	14,246	458	104	102,127	148,744
2010	52,972	18,522	715	213	197,406	269,828
2011	62,248	18,210	744	254	289,522	370,978
2012	78,373	13,724	855	238	294,264	387,454
2013	87,041	14,095	909	186	295,264	397,495
2014	90,900	13,140	824	226	298,818	403,908

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (data diolah), 2015

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung cenderung meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2014. Hal ini juga disebabkan adanya kemudahan yang diberikan oleh perusahaan/dealer bagi masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor.

PDRB Perkapita merupakan indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita diperoleh melalui hasil bagi antara PDRB atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk (BPS Kota Bandar Lampung, 2012). Tabel 1.7 menyajikan data PDRB Kota Bandar Lampung berdasarkan atas dasar harga konstan

dengan tahun dasar 2000, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dan PDRB Perkapita.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kota Bandar Lampung cenderung meningkat, yang berarti bahwa pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung cenderung meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2014.

Tabel 1.7 PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2008 – 2014

Tahun	PDRB atas dasar Harga Konstan (rupiah)	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB Perkapita (rupiah)
2008	5,802,307.55	822,880	7,051,219.56
2009	6,151,068.58	833,517	7,379,655.83
2010	6,540,520.84	881,801	7,417,230.01
2011	6,967,850.70	891,374	7,816,977.72
2012	7,423,369.02	902,885	8,221,832.26
2013	7,905,567.01	942,039	8,391,974.23
2014	8,415,525.60	960,695	8,759,830.75

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2015

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Tabel 1.8 menyajikan data inflasi di Kota Bandar Lampung yang berfluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 14,82%, kemudian pada tahun 2009 inflasi turun menjadi 4,17%. Pada tahun 2010 inflasi mengalami kenaikan menjadi 9,95% dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 dengan

tingkat inflasi sebesar 4,24%. Dari tahun 2012 sampai pada tahun 2014 inflasi cenderung naik sampai pada nilai sebesar 8,36%.

Tabel 1.8 Jumlah Tingkat Inflasi Kota Bandar Lampung Tahun 2008 – 2014

Tahun	Inflasi
2008	14.82
2009	4.17
2010	9.95
2011	4.24
2012	4.30
2013	7.56
2014	8.36

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung, 2014

Pertumbuhan inflasi juga akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Inflasi mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan membayar retribusi daerah, khususnya pembayaran retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

Tarif pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung juga mempunyai besaran yang berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ditetapkan bahwa struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir, dan/atau durasi berlangganan. Prosedur pembayaran tarif retribusi disediakan dalam dua pilihan yaitu membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan. Tabel 1.9

menyajikan data besaran tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan tarif progresif di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.9 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

No.	Uraian	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1.	Zona I	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 2.500,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-/jam
		Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Untuk 0 – 1 jam pertama 3.500,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam
		Bus, Truk dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 4.500,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.500,-/jam
		Truk Gandeng, Trailer Kontainer	Untuk 0 – 1 jam pertama 5.500,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,-/jam
		Sepeda Motor	Untuk 0 – 1 jam pertama 1.500,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-/jam
2.	Zona II	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 2.000,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-/jam
		Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Untuk 0 – 1 jam pertama 3.000,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-/jam
		Bus, Truk dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 4.000,-/1 jam	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam

Tabel 1.9 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2011 (lanjutan)

No.	Uraian	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
2.	Zona II	Truk Gandeng, Trailer Kontainer	Untuk 0 – 1 6.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,- /jam
		Sepeda Motor	Untuk 0 – 1 1.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 500,-/jam

Sumber : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011

Besaran tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum berdasarkan tarif berlangganan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Jenis kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya mempunyai tarif berlangganan sebesar Rp 60.000,00 per bulan. Jenis kendaraan bermotor roda empat seperti kendaraan angkutan barang jenis box mempunyai tarif berlangganan sebesar Rp 90.000,00 per bulan. Jenis kendaraan bermotor roda dua mempunyai tarif berlangganan sebesar Rp 30.000,00 per bulan.

Tabel 1.10 Tarif Retribusi Parkir Berlangganan di Kota Bandar Lampung

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp 60.000,-/bulan
2.	Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Rp 90.000,-/bulan
3.	Sepeda Motor Roda 2	Rp 30.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011

Selama Tahun 2008 sampai dengan 2014 tarif retribusi parkir telah mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung. Penerimaan retribusi parkir pada tahun 2008 sampai dengan 2010 menggunakan besaran tarif berdasarkan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Penerimaan retribusi parkir pada tahun 2011 sampai dengan 2014 menggunakan besaran tarif berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Tabel 1.11 memperlihatkan perkembangan tarif retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, sebagai contoh tarif dari jenis kendaraan sepeda motor semula bertarif Rp 500,- (lima ratus rupiah) pada tahun 2008 kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) pada tahun 2014, begitu juga tarif retribusi parkir untuk jenis kendaraan yang lain.

Tabel 1.11 Perkembangan Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Sedan	Mobil Beban	Mobil Bus/Truck	Truck Gandeng	Sepeda Motor	Ket.
1	Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1000	1500	2,000	2,500	500	-
2	Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2000	3000	4,000	5,000	1,000	Zona II
		2500	3500	4500	5500	1500	Zona I

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, 2014

Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari tenaga juru parkir yang bertugas sebagai pengelola parkir di lapangan. Jumlah petugas juru parkir yang terdaftar pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dari Tahun 2008 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Jumlah Petugas Juru Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung Tahun 2008 - 2014

Tahun	Juru Parkir (org)
2008	425
2009	463
2010	480
2011	572
2012	270
2013	376
2014	662

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,2015

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 jumlah tenaga juru parkir semakin meningkat, namun pada Tahun 2012 jumlah tenaga parkir berjumlah 270 orang, hal ini dikarenakan pengelolaan parkir diserahkan/bermitra dengan Pihak Ketiga yaitu pada PT. Mitra Bina Persada (PT. MBP) Bandar Lampung yang menggunakan teknologi komputerisasi dalam penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum khususnya di daerah Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2013 PT. Mitra Bina Persada menambah kembali tenaga juru parkir menjadi 376 orang dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 662 orang.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian tentang penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terjadinya penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berfluktuasi dan tidak mencapai target, menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG”.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

- a. Mengapa penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung tidak mencapai target?
- b. Berapa besar pengaruh PDRB Perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan inflasi terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2014.
- b. Mengetahui pengaruh PDRB Perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan inflasi terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai kajian di bidang ilmu pengetahuan ekonomi dalam melihat dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung pada tahun 2008 sampai dengan 2014.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan masukan dan pertimbangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk menentukan arah kebijakan dalam pengoptimalan pengelolaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di masa yang akan datang.
- 2) Menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

D. Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang telah terbagi menjadi tiga golongan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis retribusi yang terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Ruang lingkup permasalahan ini dibatasi pada penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung. Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pengertian Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan penumpang, bus, dan kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan tepi jalan umum yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pengertian tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat-tempat parkir di tepi jalan umum sepanjang daerah pengawasan jalan dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan Walikota.

E. Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Merujuk pada teori dan berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa PDRB perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan inflasi dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

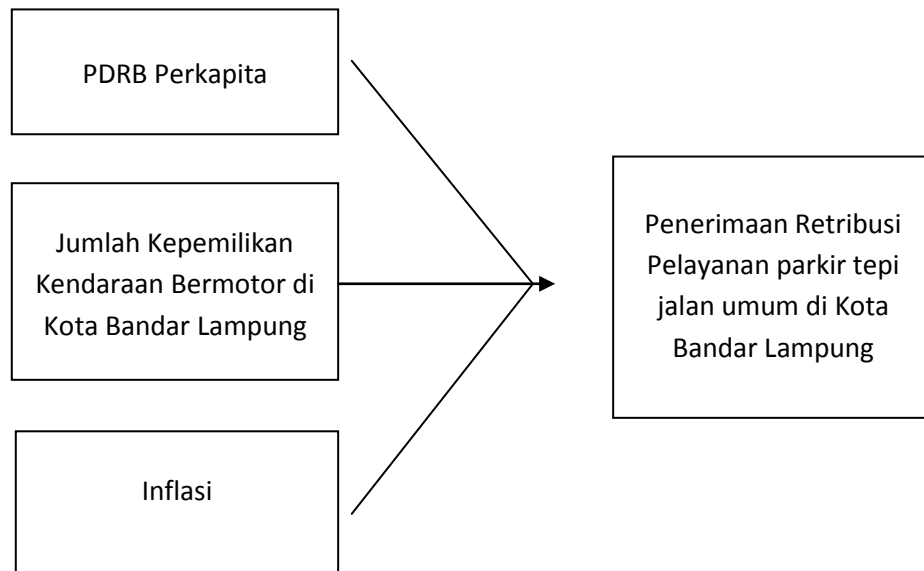
PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Nilai PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar/membeli barang dan jasa ataupun pungutan yang ditetapkan pemerintah seperti pajak dan retribusi daerah, hal ini berarti bahwa PDRB Perkapita suatu daerah dapat mempengaruhi kenaikan dari penerimaan daerah.

b. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung

Dalam penelitian ini, data jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan adalah jumlah kepemilikan kendaraan yang ada di Kota Bandar Lampung dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Semakin banyak kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandar Lampung maka akan mempengaruhi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum.

c. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari barang dan jasa yang terus menerus akan mempengaruhi daya beli masyarakat, bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap masih memiliki kemampuan untuk membayar retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, sehingga inflasi juga dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.



Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat dilihat pada Gambar 1.3, dimana dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa variabel PDRB Perkapita, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, dan inflasi dapat mempengaruhi besaran penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung.

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Jumlah PDRB Kota Bandar Lampung diduga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung.
2. Jumlah kendaraan bermotor diduga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung.
3. Inflasi diduga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri secara bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan, yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain, hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.

3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

1. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi dua menurut wilayahnya, yang meliputi Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a. Pajak Propinsi

Pajak Propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi, yang terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;

- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Pada Retribusi Daerah, penggolongan jenis Retribusi yang dapat dipungut tidak digolongkan atas level pemerintahan (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota) sebagaimana kita lihat pada jenis Pajak Daerah. Penentuan pihak mana yang dapat memungut atas sebuah jenis Retribusi Daerah ditentukan atas urusan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada kasus tertentu apabila Peraturan Pemerintah dimaksud belum dapat diterapkan efektif, maka pemungut retribusi ditentukan atas siapa yang memberikan layanan/jasa. Misalnya pelayanan tera/tera ulang yang belum dapat dilakukan efektif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Retribusi dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi apabila Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan jasa tera/tera ulang.

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

- 1) Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- 2) Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
- 3) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- 4) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Siahaan (2005) menyatakan bahwa perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut :

- 1) Kontra Prestasinya

Pada retribusi, kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

- 2) Balas Jasa Pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3) Sifat Pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4) Sifat Pelaksanaannya

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5) Lembaga atau Badan Pemungutnya

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian Jasa sendiri adalah

kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Objek retribusi terbagi menjadi tiga golongan retribusi, yaitu :

a. Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan atau
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang telah terbagi menjadi tiga golongan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis retribusi yang terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pada pasal 150 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa selain jenis retribusi daerah tersebut di atas, masih dimungkinkan pemungutan atas jenis retribusi daerah lainnya, sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum :

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- 4) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial;
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha :

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan

- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 - 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
 - 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan, hal ini diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengertian penerimaan lain-lain pada dasarnya merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan labaperusahaan daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen lain-lain PAD yang sah terdiri dari hibah, penjualan aset daerah, jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, angsuran atau cicilan kendaraan bermotor, sumbangan dari perum jasa raharja dan rupa-rupa pendapatan.

B. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Retribusi Daerah

1. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004:163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan dari masing-masing jenis retribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu ditingkatkan.

2. Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Halim (2004:163) Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) telah menguraikan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Potensi retribusi daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan retribusi daerah (Halim, 2007). Menurut Ekalaya (2005) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan kekuatannya. Dengan demikian, jika pengertian potensi tersebut dikaitkan dengan potensi retribusi, maka potensi retribusi dapat diartikan sebagai suatu jumlah retribusi yang dapat diterima atau dipungut dan kemungkinan dapat dikembangkan. Kemampuan yang dapat dikembangkan ini sesuai dengan keadaan obyeknya dan diharapkan dapat dipungut dari wajib retribusi pada waktu tertentu atau sebagai suatu kemampuan maksimal dari dasar (basis) retribusi itu sendiri untuk dieksploitasi dan kemampuan optimal untuk mengeksploitasinya.

Menurut Halim (2007:97) untuk mengetahui potensi retribusi adalah: kondisi awal suatu daerah, perkembangan PDRB perkapita rill, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, dan penyesuaian tarif. Beberapa variabel yang perlu dianalisis untuk mengetahui potensi sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana dikutip dari Muhammad Masrofi (2004) adalah :

a. Kondisi awal suatu daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan daerah yang berbasis pertanian tentunya kemampuan pungutan akan berbeda dengan yang berbasis industri. Untuk yang berbasis pertanian mempunyai kemampuan membayar pungutan sangat rendah, sementara daerah yang berbasis industri mempunyai kemampuan untuk membayar retribusi.

b. Perkembangan PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nilai PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah walaupun sebenarnya nilai PDRB perkapita ini belum tentu dinikmati oleh masyarakat di daerah tersebut. Meningkatnya PDRB ini berdampak pada naiknya kesejahteraan penduduk yang dapat dilihat secara tidak langsung dari besarnya perkapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, berarti semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah semakin besar potensi penerimaan daerah.

c. Panjang Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana penting di dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah yang lain dan sebagai lahan dari parkir tepi jalan umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

d. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Mardiasmo dan Makhfatih (2000 : 10) bahwa inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan daerah jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omzet penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak atau retribusi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan inflasi berhubungan positif dengan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

e. Penyesuaian Tarif

Meningkatnya pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif, dalam hal ini untuk tarif retribusi yang ditetapkan tetap (flat) maka

dalam penyesuaian tarif retribusi dasar selain harus mempertimbangkan laju inflasi, juga perlu ditinjau hubungan antara biaya pelayanan dan jasa penerimaan pendapatan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan daerah adalah perkembangan PDRB perkapita, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, dan peraturan pemerintah (penyesuaian tarif).

C. Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Masing-masing peraturan daerah tersebut telah mengatur jenis-jenis retribusi daerah di Kota Bandar Lampung diantaranya adalah :

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 12) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Sebagai contoh ada beberapa daerah yang memberlakukan pelayanan gratis untuk penerbitan KTP. Di beberapa daerah yang surplus kemampuan fiskalnya juga ada yang memberlakukan pelayanan kesehatan gratis.

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan ikan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan di Kota Bandar Lampung disesuaikan dengan potensi daerah Kota Bandar Lampung. Jenis retribusi daerah dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Sebagai contoh ada beberapa daerah yang memberlakukan pelayanan gratis untuk penerbitan KTP. Di beberapa daerah yang surplus kemampuan fiskalnya juga ada yang memberlakukan pelayanan kesehatan gratis.

D. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa :

1. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan.
2. Jalan Umum sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dalam dua zona.
3. Pembagian zona didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian zona tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Kemudian dijelaskan pada Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa yang menjadi subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi

dan/atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan dan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tersebut dijabarkan dalam peraturan yang menetapkan khusus untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pada Bab III Pasal 5 Peraturan Walikota Bandar Lampung tersebut dijelaskan tentang Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu diukur berdasarkan Zona Parkir, Jenis Kendaraan, dan Frekwensi/waktu Pemakaian Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

Selanjutnya struktur dan besarnya tarif retribusi diatur dalam Bab IV Pasal 6, yaitu :

1. Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir dan/atau durasi berlangganan.
2. Prosedur pembayaran tarif retribusi disediakan dalam dua pilihan yaitu dengan membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.
3. Pilihan atas prosedur pembayaran diserahkan secara mutlak kepada wajib retribusi untuk dipilih.
4. Dalam rangka penerimaan pembayaran tarif retribusi, pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan prinsip dasar retribusi.

5. Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan seperti pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung

No.	Uraian	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1.	Zona I	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 2.500,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-/jam
		Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Untuk 0 – 1 jam pertama 3.500,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam
		Bus, Truk dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 4.500,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.500,-/jam
		Truk Gandeng, Trailer Kontainer	Untuk 0 – 1 jam pertama 5.500,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,-/jam
		Sepeda Motor	Untuk 0 – 1 jam pertama 1.500,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-/jam
2.	Zona II	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 2.000,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-/jam
		Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Untuk 0 – 1 jam pertama 3.000,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-/jam
		Bus, Truk dan sejenisnya	Untuk 0 – 1 jam pertama 4.000,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bandar Lampung (lanjutan)

No.	Uraian	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
2.	Zona II	Truk Gandeng, Trailer, Kontainer	Untuk 0 – 1 jam pertama 6.000,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,-/jam
		Sepeda Motor	Untuk 0 – 1 jam pertama 1.000,-/1	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 500,-/jam

Sumber : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa untuk jenis kendaraan roda empat memiliki tarif parkir yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan, untuk besaran tarif parkir setiap 1 jam pertama setiap jenis kendaraan yang telah digolongkan menjadi kelas sedan, kelas angkutan barang jenis box, truck, kontainer adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah). Selain tarif harian, retribusi parkir tepi jalan umum dapat menggunakan tarif berlangganan, besarnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tarif Retribusi Parkir Berlangganan di Kota Bandar Lampung

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Tambahan Per Jam (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp 60.000,-/bulan
2.	Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Rp 90.000,-/bulan
3.	Sepeda Motor Roda 2	Rp 30.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan dengan menggunakan karcis ataupun dengan kartu langganan :

a. Pemungutan retribusi dengan karcis

Wajib retribusi yang memarkirkan kendaraan di tempat parkir di tepi jalan umum memperoleh karcis yang telah di cap/diforforasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dari Juru Parkir dan membayarnya kepada Juru Parkir sesuai dengan waktu pemakaian tempat parkir. Juru Parkir menyetorkan hasilnya kepada petugas Pengelola Wilayah Parkir pada hari itu juga, dan Petugas Pengelola Wilayah Parkir menyetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima UPT Parkir dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan selanjutnya bendaharawan menyetorkan hasil pungutan retribusi tersebut ke Rekening Kas Daerah.

b. Pemungutan Retribusi dengan Kartu Langganan Bulanan Parkir

Terhadap kendaraan bermotor yang intensitas parkirnya cukup tinggi dapat diberikan dispensasi oleh Walikota berupa Kartu Langganan Bulanan yang berlaku di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung kecuali Gedung Parkir. Kartu Bulanan dimaksud harus ditempelkan pada kaca mobil depan di sebelah kanan dalam, kecuali kendaraan bermotor roda 2 (dua). Untuk mendapatkan Kartu langganan bulanan tersebut, wajib retribusi mengisi Surat Permohonan Berlangganan Bulanan Parkir kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Selanjutnya wajib retribusi didata oleh Tim Pendataan untuk didaftarkan pada Daftar Induk Wajib Retribusi sehingga dapat ditetapkan

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). Pembayaran retribusi berlangganan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah tempat kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan terbagi atas Zona I dan Zona II yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Wilayah Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung

No.	Wilayah Pemungutan Retribusi		
	Zona	Wilayah Parkir	Lokasi
I	Zona I	Wilayah Parkir I	- Jl. Jenderal R. Suprpto
		Wilayah Parkir II	- Jl. Pemuda
		Wilayah Parkir III	- Jl. Pangkal Pinang
		Wilayah Parkir IV	- Jl. Bengkulu
		Wilayah Parkir V	- Jl. Batu Sangkar
		Wilayah Parkir VI	- Pelataran Bambu Kuning Belakang dan Samping Kiri dan Kanan
		Wilayah Parkir VII	- Komplek Pasar Bambu Kuning Plaza
		Wilayah Parkir VIII	- Jl. Tanjung Pinang - Jl. Si Bolga - Jl. Palembang I, II - Jl. Baru - Jl. Padang - Jl. Kota Raja - Jl. Kartini (dari Jalan Bengkulu s/d Jalan Kota Raja)

Tabel 2.3 Wilayah Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung (lanjutan)

No.	Wilayah Pemungutan Retribusi		
	Zona	Wilayah Parkir	Lokasi
	Zona II	Wilayah Parkir IX	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Ahmad Yani - Jl. Wolter Monginsidi - Jl. Kartini (dari Jl. Wolter Monginsidi s/d Jl. Imam Bonjol) - Jl. S. Parman - Jl. Cut Nyak Dien - Jl. Kapten Tendean - Jl. Katamso - Jl. Agus Salim
		Wilayah Parkir X	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Bukit Tinggi - Jl. Imam Bonjol - Jl. Pisang - Jl. Durian - Jl. Manggis - Jl. Rambutan - Jl. Mangga - Jl. Duku - Jl. Kartini (eks. Dwi Warna) - Komplek Pasar Tamin
		Wilayah Parkir XI	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Soekarno Hatta (dari Tugu Raden Intan s/d Jalan Pangeran Antasari) - Jl. Kimaja - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Pajajaran - Jl. Teuku Umar - Jl. Zainal Abidin Pagar Alam - Jl. Sultan Agung - Komplek PKOR Way Halim - Komplek Pasar Way Halim - Komplek Pasar Way Kandis

Tabel 2.3 Wilayah Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung (lanjutan)

No.	Wilayah Pemungutan Retribusi	
	Zona	Lokasi
	Wilayah Parkir XII	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Raden Intan - Jl. Pemuda Bawah (dari Jl. Raden Intan s/d Jl. Hayam Wuruk) - Jl. Diponegoro - Jl. Jend. Sudirman (dari Jl. Raden Intan s/d Jl. Ir. H. Juanda) - Komplek Gedung Olah Raga Saburai dan Pasar Seni - Jl. Hayam Wuruk (dari Jl. Pemuda s/d Jl. Yudistira)
	Wilayah Parkir XIII (a)	<ul style="list-style-type: none"> - Komplek Pasar Tugu - Komplek Pasar Sukarame - Jl. Pangeran Antasari - Jl. Pangeran Tirtayasa - Jl. Hayam Wuruk
	Wilayah Parkir XIII (b)	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Gajah Mada - Jl. Dr. Susilo - Jl. Ir. Juanda - Jl. Way Ngarip - Jl. Cendana - Jl. Way Sabu - Jl. KH. Ahmad Dahlan - Jl. Jend. Sudirman (dari Jl. Ir. H. Juanda s/d Jl. Gatot Subroto) - Komplek Stadion Pahoman
	Wilayah Parkir XIV	<ul style="list-style-type: none"> - Pelataran Parkir Apotek Enggal
	Wilayah Parkir XV	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Ikan Bawal - Jl. Ikan Hiu s/d Perempatan Jl. Ikan Tongkol - Jl. Ikan Gurame - Jl. Ikan Hiu Blok C (dari Jalan Ikan Hiu s/d Jalan Ikan Gurame)

Tabel 2.3 Wilayah Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung (lanjutan)

No.	Wilayah Pemungutan Retribusi	
	Zona	Lokasi
	Wilayah Parkir XVI	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Ikan Tongkol - Jl. Ikan Hiu (dari Jl. Ikan Tongkol s/d Jl. Ikan Kakap) - Jl. Ikan Bandeng - Jl. Ikan Belida
	Wilayah Parkir XVII	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Ikan Kakap - Jl. Hasanuddin - Jl. Ikan Kitter - Jl. Ikan Mas - Jl. Ikan Tenggiri - Jl. Pattimura - Jl. Laks. Malahayati (dari Jl. Ikan Bawal s/d Pasar Cimeng) - Komplek Pasar Kangkung - Komplek Santap Malam
	Wilayah Parkir XVIII	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Yos Sudarso (dari Jl. Malahayati s/d Terminal Sukaraja) - Jl. Laks. Malahayati s/d Jl. Ikan Bawal) - Jl. Mayor Salim Batubara - Komplek Pasar Bumi Waras - Komplek Santap Malam
	Wilayah Parkir XIX	<ul style="list-style-type: none"> - Jl. Gatot Subroto - Jl. Yos Sudarso (dari Terminal Sukaraja s/d Jl. Soekarno Hatta) - Jl. Bahari - Jl. Soekarno Hatta (dari Jalan Pangeran Antasari s/d Tugu Perbatasan Lampung Selatan) - Jl. M. Salim - Komplek Pemandangan - Komplek Pantai Harapan - Komplek Pasar Panjang

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2014

Penetapan tarif juga mempunyai pengaruh terhadap penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Jika tarif retribusi yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat (Arizaldy, 2009). Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 83 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan bahwa struktur besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir, dan/atau durasi berlangganan. Prosedur pembayaran tarif retribusi disediakan dalam dua pilihan yaitu membayar berdasarkan tarif progresif atau membayar secara berlangganan.

Tabel 2.4 Perkembangan Penetapan Tarif Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung

No.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung	Jenis Kendaraan	Besaran Tarif
1.	Perda No. 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp 500,-
		Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Rp 1.000,-
		Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 1.500,-
		Truk Gandeng, Trailer Kontainer	Rp 2.000,-
		Sepeda Motor	Rp 200,-
2.	Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp 1.000,-
		Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Rp 1.500,-
		Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 2.000,-
		Truk Gandeng, Trailer Kontainer	Rp 2.500,-
		Sepeda Motor	Rp 500,-

Tabel 2.4 Perkembangan Penetapan Tarif Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung (lanjutan)

No.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung	Jenis Kendaraan	Besaran Tarif	
			Zona I	Zona II
3.	Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp 2.500,-	Rp 2.000,-
		Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box	Rp 3.500,-	Rp 3.000,-
		Bus, Truk dan sejenisnya	Rp 4.500,-	Rp 4.000,-
		Truk Gandeng, Trailer Kontainer	Rp 5.500,-	Rp 5.000,-
		Sepeda Motor	Rp 1.500,-	Rp 1.000,-

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung

Tabel 2.4 menyajikan data perkembangan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah di Kota Bandar Lampung. Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 masih dilaksanakan berdasarkan frekuensi parkir. Namun sejak tahun 2012 setelah pengelolaan parkir diserahkan kepada PT. Mitra Bina Persada (MBP) maka penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum khususnya di daerah Pasar Tengah telah dilaksanakan tarif progresif.

E. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama setahun tanpa memperhatikan pemilik kegiatan tersebut. PDRB Perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu daerah atau wilayah.

Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya perkembangan pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan terjadinya peningkatan PDRB perkapita. PDRB Perkapita diperoleh hasil bagi antara PDRB dengan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di daerah yang bersangkutan.

Salah satu manfaat PDRB untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. PDRB dapat dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar perhitungannya. Lebih lanjut disebutkan bahwa indikator pendapatan perkapita lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB karena secara simultan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) definisi Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan bentuk penyajian data yang bisa menggambarkan struktur perekonomian daerah pada tahun yang bersangkutan, dimana dalam PDRB terdiri dari 9 sektor yang telah terbagi menjadi sektor pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan, Angkutan dan

Komunikasi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta sektor jasa-jasa.

1. Pertanian meliputi pertanian Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan jasa pertanian.

a. Pertanian tanaman makanan adalah kegiatan/lapangan usaha, penyiapan pelaksanaan penanaman, pendidikan, persemaian, pemeliharaan dan pemanenan tanaman pangan.

b. Pertanian tanaman lainnya meliputi tanaman perkebunan dan selain perkebunan.

c. Peternakan adalah kegiatan/lapangan usaha pemeliharaan hewan ternak besar, hewan ternak kecil, unggas, ulat sutera.

d. Jasa pertanian dan peternakan adalah kegiatan lapangan usaha yang meliputi pengolahan tanah, pemupukan, penyebaran bibit persemaian, penyemprotan dan pembasmian hama, penyelenggaraan irigasi, penyewaan alat pertanian.

e. Perikanan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan semua hasil perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam dan keramba.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan yang dicakup disini adalah minyak bumi dan gasbumi, yodium, biji mangaan, belerang dan segala jenis hasil penggalian.

3. Industri pengolahan adalah kegiatan/lapangan usaha pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, bahan makanan minuman dan tembakau,

tekstil, barang dari kulit, barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, kertas dan barang cetakan, pupuk kimia dan barang dari karet dan lainnya.

4. Listrik, gas dan air.
 - a. Listrik adalah kegiatan/lapangan usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian jaringan distribusi guna penyaluran listrik untuk dijual kepada rumah tangga, industri dan pengguna lainnya.
 - b. Gas, uap dan air panas adalah kegiatan/lapangan usaha memproduksi dan mendistribusikan gas alam, uap dan air panas untuk dijual kepada rumah tangga, industri dan pengguna lainnya.
 - c. Penjernihan, penyediaan dan penyaluran air adalah kegiatan/lapangan usaha penampungan, penjernihan dan pendistribusian air pada rumah tangga, industri dan lainnya.
5. Bangunan adalah kegiatan/lapangan usaha dalam pembuatan/perbaikan pembongkaran gedung/rumah, jalan dan jembatan, bendungan dan saluran air, dermaga, pembangkit tenaga listrik, jaringan komunikasi, persewaan alat-alat konstruksi dan sebagainya.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli atas suatu barang termasuk usaha restoran, katering, kafetaria, kantin, penginapan (hotel, motel, yang menyediakan makanan).
7. Angkutan, perdagangan dan komunikasi.
 - a. Angkutan adalah kegiatan/lapangan usaha pengangkutan barang atau penumpang/warga dengan angkutan darat, laut, sungai dan kapal serta angkutan udara, pengepakan dan pengiriman barang, usaha persewaan alat angkutan darat, air, udara.

- b. Pergudangan adalah kegiatan/lapangan usaha penyiapan barang di gudang dengan fasilitas-fasilitasnya seperti penyimpanan barang dalam kamar/ruang pendingin (*cold storage*) di gudang-gudang barang.
 - c. Komunikasi adalah kegiatan/lapangan usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik melalui pos, telepon, telegram atau hubungan radio.
8. Keuangan, asuransi termasuk usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.
- a. Lembaga keuangan adalah kegiatan/lapangan usaha perbankan, baik yang dikelola pemerintah atau swasta seperti bank devisa, bank tabungan, bank kredit atau bank yang melayani pemindahan cadangan uang dengan surat-surat berharga, termasuk juga usaha pegadaian, pasar modal, usaha jasa keuangan lainnya.
 - b. Asuransi adalah kegiatan/lapangan usaha perasuransian seperti asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, konsultasi, asuransi, dan dana pensiun.
 - c. Usaha persewaan/jual beli barang, gedung dan jasa perusahaan adalah kegiatan/lapangan usaha persewaan jual-beli barang-barang tidak bergerak, agen real estate, penjualan dan penafsiran nilai tanah bangunan atas dasar balas jasa/kontrak.
9. Sektor jasa yang dicakup dalam dua sektor yaitu jasa bioskop, panggung kesenian, radio swasta dan taman hiburan. Sektor perorangan dan rumah

tangga yang mencakup jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan, dan pembantu rumah tangga.

Pengukuran besaran PDRB dapat dihitung melalui pengukuran arus sirkulasi dan pengukurannya dibedakan menjadi tiga cara yaitu metode total keluaran; metode pengeluaran atas keluaran; dan metode pendapatan dari produksi. Penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut pendekatan produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor.

2. Menurut pendekatan pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu :

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stock, dan
- e. Ekspor neto dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

3. Menurut pendekatan pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun), balas jasa faktor produksi yang dimaksud

adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB selain faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung, jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk Domestik Bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Dari ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto yang telah diuraikan di atas disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

F. Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah khususnya penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum adalah :

1. Intensifikasi

Intensifikasi, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah dengan tidak merubah sumber penerimaan baru atau dengan kata lain bagaimana cara mengelola yang telah ada menjadi sumber penerimaan daerah yang baik dengan mengidentifikasi

pemungutan retribusi daerah dan mengefisiensikan cara pemungutannya pada subjek dan objek yang sudah dikenakan pajak sebelumnya. Menurut Halim (2004:109) Intensifikasi merupakan suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (Halim:2004). Ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah yaitu usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan cara memperluas dan menambah sumber-sumber penerimaan baru serta mengaktifkan, mengembangkan, menggali sumber-sumber penerimaan yang ada. Mobilitas dan faktor sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah sehingga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi yang dapat mengurangi penerimaan retribusi daerah. Implikasi kebijakan penerimaan retribusi daerah yakni mencari terobosan baru sesuai ketentuan berlaku dan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak retribusi daerah.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan kajian yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

PENELITI	TAHUN	JUDUL	VARIABEL	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
ARI BUDIHARJO	2003	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah	1. Variabel terikat : a. Penerimaan PBB 2. Variabel bebas : a. Produk Domestik Regional Bruto b. Penduduk c. Inflasi	Penelitian ini menggunakan metode Pooling data yaitu menggabungkan antara data runtut waktu dengan data silang tempat yang hasilnya akan ditest dengan kriteria teori, kriteria statistik dan kriteria ekonomi.	1. Jumlah penduduk secara signifikan berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB baik di Kabupaten maupun Kota. 2. Produk Domestik Regional Bruto Berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB di Kota tetapi tidak signifikan pengaruhnya di Kabupaten. 3. Inflasi Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB baik di Kabupaten maupun di Kota.
MUHAMMAD MASROFI	2004	Potensi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Semarang)	1. Variabel Terikat : a. Pajak dan Retribusi Daerah 2. Variabel Bebas : a. PDRB Riil b. Jumlah Penduduk	Analisis Regresi Linier Berganda	PDRB Riil dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan variabel inflasi dan perubahan peraturan perundang-undangan tidak signifikan.

SUYANTO DAN NUSANTORO	2008	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro	<ul style="list-style-type: none"> - PAD - PDRB - Jumlah penduduk - Tingkat inflasi 	Analisis deskriptif kuantitatif	PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi secara individual dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Metro
MUHAMMAD SYAIFUDDIN AMBIA, RIA A. A. SOEMITRO, DAN RETNO INDRYANI	2010	Kajian Potensi dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan (<i>On-Street Parking</i>) Kota Banda Aceh	- variabel prediktor : potensi parkir mobil (X1), potensi parkir sepeda motor (X2) dan nilai selisih (Y) merupakan variabel kriteria	korelasi <i>product moment pearson</i> , uji t, uji F dan regresi berganda	Hasil penelitian terdapat korelasi positif dan signifikan baik secara uji serentak maupun uji parsial antara potensi dan selisih potensi dengan realisasi penerimaan, nilai $r = 0,839$, $R^2 = 0,705$; $Y = -14183,2 + 0,299 X1 + 0,376 X2$, $F = 13,124$ $sig = 0,001$; (X1) $t = 2,054$ $sig = 0,064$; (X2) $t = 1,966$ $sig = 0,075$, dengan tingkat selisih sebesar 33,8%.
JUFRIZEN	2013	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir pada Pusat-pusat Perbelanjaan Kota Medan	-	Analisis Deskriptif Kualitatif	Target yang ditetapkan sebesar 52,50% dari kapasitas yang sebenarnya dan terdapat 48,50% kapasitas yang hilang

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data *time series*. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Setiawan, 2005:163). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang dikumpulkan berupa data perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Pendapatan Perkapita), penerimaan Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung, dan Tingkat Inflasi.

Data dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandar Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain dari Perpustakaan

FEB Unila, serta bahan lainnya dari internet yang relevan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bandar Lampung, dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berupa data penerimaan restribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Dokumen

Menurut Sugiono (2008:82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, laporan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, PDRB Kota Bandar Lampung dan Buku Kota Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2013.

C. Metode Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program aplikasi Eviews 6. Tidak semua data didapat langsung dari sumber terkait, beberapa data dalam penelitian ini didapat dari suatu proses metode pemecahan (interpolasi) dan peramalan data secara statistik. Berikut beberapa metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

Interpolasi

Proses interpolasi merupakan proses pencocokan kurva (*curve fitting*) yaitu proses mencocokkan nilai hasil proyeksi dan peramalan terhadap nilai aktualnya sehingga mencapai tingkat ketelitian yang tinggi (Rinaldi Munir, 2005). Metode interpolasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai data *time series* yang mempunyai rentan waktu lebih besar ke data yang memiliki rentan waktu yang lebih kecil (tahun ke triwulan, tahun ke bulan). Sebelum melakukan interpolasi data terlebih dahulu perlu diperhatikan karakteristik data, yaitu data yang dipakai berbentuk rata-rata

atau akumulasi. Data yang dilakukan interpolasi yaitu data PDRB perkapita, data PDRB perkapita berupa data tahunan yang telah sesuai karakteristik untuk dilakukan metode interpolasi, agar menjadikan data tersebut bulanan. Metode interpolasi data dalam penelitian ini adalah menaksir nilai bulanan dari suatu data tahunan, alat yang dipakai adalah *Conversion Option – Eviews 6*.

Interpolasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *quadratic math sum* yaitu sebagai berikut:

$$M_{1t} = 1/3 [Q_t - 1,5/3 (Q_t - Q_{t-1})]$$

$$M_{2t} = 1/3 [Q_t - 0/3 (Q_t - Q_{t-1})]$$

$$M_{3t} = 1/3 [Q_t - 1,5/3 (Q_t - Q_{t-1})]$$

Dimana:

M_n = Data Bulanan

Q_n = Data Tahunan yang berlaku

Q_{t-1} = Data Tahunan sebelumnya

Metode *quadratic math sum* ini digunakan dalam *polynomial quadratic* untuk beberapa observasi dari frekuensi series yang rendah, kemudian *polynomial* ini digunakan untuk memenuhi semua observasi dari sekumpulan series yang berfrekuensi tinggi dalam suatu periode. *Quadratic polynomial* terbentuk dengan menetapkan tiga poin yang berdekatan dari sumber series dan kuadrat yang pas diantara *average atau the sum of hight frequency* yang cocok dengan data penelitian aktual dengan frekuensi yang rendah. Hal yang

terpenting, satu poin sebelum dan satu poin sesudah dalam suatu periode yang berjalan akan diinterpolasi dan digunakan untuk menyediakan poin ketiga. Untuk poin terakhir, dua periode ditambahkan diantara satu sisi dimana data tersedia.

Hasil dari interpolasi tidak membatasi untuk dilakukannya pembatasan diantara periode yang berdekatan. Oleh karena itu, metode ini lebih pas untuk situasi dimana beberapa data yang akan di interpolasi dan sumber data akan lebih halus.

D. Spesifikasi Model Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh PDRB perkapita, jumlah kendaraan bermotor (KBM), inflasi (INF) terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, maka penelitian ini menggunakan model Regresi Linier Berganda/ *Ordinar Least Square* (OLS) yaitu :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{KBM} + \beta_3 \text{INF} + \varepsilon$$

Dimana:

Y	=	Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (rupiah)
β_0	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
PDRB	=	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (rupiah)
KBM	=	Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung (unit)
INF	=	Inflasi Kota Bandar Lampung (persen)
ε	=	Variabel sisa

E. Regresi Linier Berganda

1. Metode Regresi Linear Berganda/ *Ordinary Least Square* (OLS)

Metode OLS adalah metode estimasi untuk mendapatkan penyimpangan/kesalahan atau *error* terkecil. Ada beberapa asumsi OLS yang digunakan dalam regresi berganda. Asumsi-asumsinya sebagai berikut:

- a. Hubungan antara X (variabel independen) dan Y (variabel dependen) adalah linier dalam parameter.
- b. Nilai X nilainya tetap (*non-statistic*) untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam kasus regresi linear berganda dimana ada dua atau lebih variabel independen ditambah tidak ada hubungan linear antara variabel independen yang ada atau tidak ada multikolinieritas.
- c. Nilai harapan (*expected value*) atau rata-rata dari variabel gangguan ε_i adalah nol.

$$E(\varepsilon_i | X_i) = 0 \quad (3.3)$$

- d. Varian dari variabel gangguan ε_i adalah sama (homokedastisitas).

$$\text{Var}(\varepsilon_i | X_i) = \sigma^2 \quad (3.4)$$

- e. Tidak ada serial korelasi antara variabel gangguan ε_i atau variabel gangguan ε_i tidak saling berhubungan dengan variabel gangguan ε_j yang lain.

$$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j | X_i, X_j) = 0 \quad (3.5)$$

- f. Variabel gangguan ε_i berdistribusi normal.

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \quad (3.6)$$

Jika asumsi–asumsi diatas terpenuhi akan menghasilkan nilai parameter yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sebelum dilakukan pengujian menggunakan regresi linier berganda, ada beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi agar kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskodesitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu: (1) Uji Kolmogorov-Smirnov; dan Uji Jarque-Bera (J-B). Uji normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B). Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat (*asymptotic*). Metode JB menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis.

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \quad (3.7)$$

Dimana S = koefisien skewness dan K = koefisien kurtosis

Jika suatu variabel didistribusikan secara normal maka nilai koefisien S = 0 dan K = 3, jika residual terdistribusi secara normal diharapkan nilai statistik JB akan sama dengan nol. Nilai statistik JB didasarkan pada distribusi *Chi Square* dengan derajat kebebasan $df = 2$. Hipotesis dalam uji normalitas yaitu H_0 : residual terdistribusi secara normal dan H_a : residual tidak terdistribusi secara normal. Dengan ketentuan sebagai berikut: jika nilai probabilitas p

dari statistik JB lebih besar dari tingkat signifikan pada distribusi *Chi Square* maka menerima H_0 . Berlaku sebaliknya, jika nilai probabilitas p dari statistik JB lebih kecil dari tingkat signifikan pada distribusi *Chi Square* maka menolak H_0 .

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan linear antara variabel dependen di dalam regresi berganda. Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel independent (bebas) dan variabel dependent (terikat) dalam suatu model regresi. Multikolinieritas akan menyebabkan estimator OLS mempunyai varian yang besar dengan demikian standar error juga besar. Multikolinieritas adalah salah satu pelanggaran terhadap asumsi model regresi klasik karena dapat mengakibatkan estimator OLS memiliki :

1. Estimator masih bersifat BLUE tetapi estimator mempunyai varian dan kovarian besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat.
2. Konsekuensi no.1, interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik signifikan.
3. Meskipun secara individu variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t, nilai koefisien determinasi R^2 masih bisa relatif tinggi.

Deteksi multikolinieritas menggunakan korelasi parsial antar variabel independen di dalam regresi. Hipotesis dalam uji multikolinieritas yaitu H_0 : tidak terdapat masalah multikolinieritas dan H_a : terdapat masalah multikolinieritas. Sebagai aturan, jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu 0,85 maka diduga ada masalah multikolinieritas dalam model berarti H_0 ditolak. Sebaliknya jika koefisien korelasi kurang dari 0,85 maka diduga tidak ada masalah multikolinieritas dalam model berarti H_0 diterima. Akan tetapi perlu kehati-hatian pada data *time series* karena jenis data *time series* seringkali menunjukkan korelasi antarvariabel independen cukup tinggi. Korelasi tinggi ini terjadi karena data *time series* menunjukkan unsur tren yaitu data bergerak naik dan turun secara bersamaan.

c. **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi adalah merupakan korelasi antara variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan observasi lain. Autokorelasi sering muncul pada data *time series*. Salah satu asumsi metode OLS adalah tidak adanya korelasi antara variabel gangguan. Apabila model mengandung autokorelasi antara variabel gangguan dengan gangguan sebelumnya maka estimator metode OLS masih menghasilkan estimator yang linier, tidak bias tetapi tidak lagi mempunyai varian minimum.

Dengan demikian adanya autokorelasi, estimator tidak menghasilkan estimator yang mempunyai varian yang minimum atau dengan kata lain tidak BLUE lagi. Konsekuensinya sebagai berikut:

1. Jika varian tidak minimum maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak bisa lagi dipercaya kebenarannya.
2. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi regresi.

Pendeteksian ada tidaknya masalah autokorelasi ada beberapa metode yang bisa digunakan yaitu metode Durbin Watson (DW) dan Metode Breush-Godfrey. Uji autokorelasi yang digunakan penelitian ini yaitu metode Breush-Godfrey atau dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Model ini digunakan untuk model variabel gangguan yang lebih tinggi maupun model regresi dengan variabel independen yang merupakan lag dari variabel dependen. Hipotesis dalam uji autokorelasi yaitu H_0 : tidak ada autokorelasi dan H_a : terdapat autokorelasi.

Kriteria keputusan uji Breush-Godfrey mengikuti distribusi *Chi Square* dengan df yaitu panjangnya kelambanan residual dalam persamaan. Jika nilai *Chi Square* hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi Square* pada derajat kepercayaan tertentu (α), kita menolak H_0 sehingga terdapat autokorelasi. Sebaliknya, nilai *Chi Square* hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi Square* maka kita gagal menolak H_0 . Artinya model tidak mengandung autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas berarti varian variabel yang tidak konstan. Salah satu metode OLS adalah bahwa varian variabel gangguan sama (homokedastisitas). Estimator OLS apabila terdapat masalah heteroskedastisitas maka estimator masih tidak bias, linier dan tidak lagi mempunyai varian yang minimum dengan kata lain tidak BLUE lagi. Konsekuensi tetap menggunakan metode OLS maka:

1. Jika varian tidak minimum menyebabkan perhitungan *standard error* metode OLS tidak lagi bisa dipercaya.
2. Akibat nomor 1 tersebut interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi *t* maupun *F* tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas bisa dideteksi menggunakan metode Park dan Glejser, Metode Korelasi Spearman, dan Metode White. Pada penelitian ini menggunakan metode White dengan regresi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen (*no cross terms*) dan regresi auxiliary dengan perkalian antar variabel independen (*cross terms*). Uji White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan R^2 yang mengikuti distribusi Chi Square dengan df sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary. Hipotesis uji heteroskedastisitas yaitu H_0 : tidak ada heteroskedastisitas dan H_a : terdapat heteroskedastisitas.

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai *Chi Square* hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi Square* pada derajat kepercayaan

tertentu (α) , maka signifikan terdapat kita menolak H_0 sehingga terdapat heteroskedastisitas artinya H_0 ditolak. Sebaliknya, nilai *Chi Square* hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi Square* maka kita gagal menolak H_0 . Artinya model tidak mengandung heteroskedastisitas.

2. Pengujian Parameter

Pengujian penduga parameter bertujuan untuk mengetahui tingkat keberartian penduga parameter yang digunakan melalui pengujian hipotesis. Apabila hipotesisnya ditolak, maka penduga parameter tersebut *significant* atau berarti.

Koefisien Determinasi

Besaran R^2 dikenal sebagai koefisien determinasi dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kebaikan (*goodness of fit*) garis regresi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui proporsi variasi dependent yang dijelaskan oleh variabel independent secara bersama-sama (gabungan). Secara verbal, R^2 mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi (Gujarati, 1999).

Dua sifat R^2 adalah :

1. R^2 merupakan besaran non negatif.
2. Batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$.

Dari nilai R^2 dapat diketahui berapa persen peranan peubah bebas dapat menjelaskan peubah tak bebas secara bersama-sama (simultan). Semakin

dekat nilai R^2 dengan angka 1 maka semakin kuatlah model tersebut dalam menerangkan peubah tak bebasnya demikian sebaliknya.

R^2 dapat dihitung dengan rumus :

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} \text{ atau } R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\bar{Y} - \hat{Y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$$

dimana :

SST = jumlah kuadrat total

SSR = jumlah kuadrat regresi

\hat{Y} = nilai dugaan Y

\bar{Y} = rata rata Y

3. Uji Kelayakan Model

a. Uji – F

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Anova (*Analysis of Variance*) yaitu uji yang digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dan untuk menguji apakah model regresi yang ada signifikan atau tidak signifikan. Dalam Widarjono (2009) uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta_i = 0$ dengan asumsi menyatakan bahwa,

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara semua variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen.

2. $H_a : \beta_i \neq 0$ dengan asumsi menyatakan bahwa,
 H_a : Terdapat pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Jika F-statistik $>$ F-tabel, maka H_0 ditolak atau H_a diterima.
Ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Sebaliknya jika F-statistik $<$ F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
Ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji -t

Uji t-statistik digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Dalam melakukan penelitian melakukan hipotesis penelitian yaitu hipotesis nol (*null hypothesis*) dan hipotesis alternatif (*alternative hypothesis*).

Menurut Widarjono (2009) prosedur uji t dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat hipotesis H_0 dan H_a

Jika hipotesis positif, maka : $H_0 : \beta_i \leq 0$ $H_a : \beta_i > 0$

Jika hipotesis Negatif, maka : $H_0 : \beta_i \geq 0$ $H_a : \beta_i < 0$

- 2) Menghitung tingkat keyakinan dan daerah kritis ($Df = n - k - 1$)
- 3) Menentukan nilai t-hitung dan t-tabel dan membandingkan nilai t-tabel dan t-hitung.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika t-hitung positif dimana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a , sedangkan apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_a .
- b. Jika t-hitung negatif dimana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_a , sedangkan apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a .

Maka pernyataan hipotesis dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabelnya adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 = 0$, (tidak ada pengaruh dari PDRB Perkapita terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum)
 $H_1 : \beta_1 > 0$, (ada pengaruh positif dari PDRB Perkapita terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum)
- 2) $H_0 : \beta_2 = 0$, (tidak ada pengaruh dari jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum)
 $H_1 : \beta_2 > 0$, (ada pengaruh positif dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum)

3) $H_0 : \beta_3 = 0$, (tidak ada pengaruh dari inflasi terhadap terhadap penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum)

$H_1 : \beta_3 > 0$, (ada pengaruh positif dari inflasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum)

F. Definisi Operasional Variabel

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nilai PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, berarti semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah semakin besar potensi penerimaan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2000 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Data PDRB Kota Bandar Lampung disajikan dalam data bulanan yang diinterpolasi dari data tahunan 2008 sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan karena data yang lain disajikan dalam bentuk bulanan.

b. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas

rel (pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam penelitian ini, data jumlah kendaraan bermotor yang digunakan adalah jumlah kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung berdasarkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

c. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Laju pertumbuhan inflasi juga akan mempengaruhi potensi penerimaan retribusi daerah. Inflasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan penerimaan daerah jika pajak ditetapkan dengan menggunakan omzet penjualan. Inflasi akan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, dan secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak atau retribusi daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tidak pernah mencapai target disebabkan :
 - 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas Petugas Juru Parkir akibat kurangnya pendidikan dari para juru parkir.
 - 2) Belum tertibnya petugas juru parkir, akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan dan penetapan sanksi yang kurang tegas.
 - 3) Kurang sempurnanya pelayanan parkir, karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan dana operasional yang tersedia.
 - 4) Beralihnya fungsi lahan parkir tepi jalan umum menjadi wilayah perdagangan kaki lima.
 - 5) Kebocoran penerimaan parkir dapat berasal dari pihak juru parkir, artinya pihak juru parkir tidak seluruhnya menyetorkan penerimaannya kepada Koordinator Lapangan (Kepala Wilayah Pemungutan Parkir) dan juga dapat berasal dari pihak pengguna

jasa parkir, artinya ada pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parkir, mungkin hal ini disebabkan karena Juru Parkir yang sibuk atau dalam waktu bersamaan ada beberapa pengguna jasa parkir yang mau meninggalkan lokasi parkir.

- 6) Penerimaan retribusi parkir juga dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca misalnya hujan dan hari libur yang kebanyakan toko-toko tidak menjalankan aktivitasnya.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum adalah bahwa PDRB perkapita Kota Bandar Lampung dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum. Sedangkan inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Bandar Lampung.
 - c. Penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yang dikelola pihak swasta memiliki administrasi yang tertib karena menggunakan sistem komputerisasi yang on line antara pintu masuk dan pintu keluar, akan tetapi laju pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kecenderungan menurun dan tingkat pertumbuhan yang rendah. Namun demikian dari data yang diperoleh walaupun tidak mencapai target, jumlah penerimaan lebih tinggi dibanding dikelola oleh Pemda sebelumnya. Sedangkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mengalami laju pertumbuhan

yang cenderung meningkat, walaupun jumlah penerimaan lebih rendah dibandingkan dikelola oleh pihak swasta.

B. Saran

1. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung adalah mengatur/membagi dan menertibkan wilayah parkir di tepi jalan umum khususnya lokasi Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dengan mengkondisikan wilayah khusus untuk roda empat dan wilayah khusus untuk roda dua.
2. Meningkatkan pengawasan
Hal ini dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan secara mendadak (sidak) terhadap petugas juru parkir di lapangan dan dilakukan secara berkala.
3. Mendaftarkan secara resmi petugas juru parkir ilegal ke dalam daftar petugas juru parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk menghindari pemungutan parkir liar.
4. Mengurangi kebocoran penerimaan retribusi parkir dengan meningkatkan pendapatan tenaga juru parkir seperti memberikan sistem penggajian yang diberikan per bulan kepada petugas juru parkir, sehingga administrasi penerimaan dapat dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel.
5. Meningkatkan tarif retribusi parkir tepi jalan umum khususnya wilayah zona I (pusat perbelanjaan) dikenakan tarif kendaraan roda empat minimal Rp 5.000,- dan kendaraan roda dua minimal Rp 3.000,-,

dengan tujuan agar PAD dapat meningkat namun secara tidak langsung dapat mengurangi kemacetan lalu lintas akibat parkir tepi jalan umum.

6. Berdasarkan pengalaman yang ada, sebaiknya penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum tetap dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui UPT Perparkira Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan menggunakan sistem yang pernah dikelola oleh pihak swasta dengan sistem komputerisasi on line.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semarang: CV Duta Nusindo, 2004
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Cahyono, Tri, “Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD Kabupaten Karanganyar Periode 1990-2002”. Solo: UPT Perpustakaan UNS, 2009.
- Ekalaya, Gumilar. Analisis Kebijakan Tarif dan Potensi Retribusi Tempat Penginapan Studi Kasus Graha Wisata Kuningan [tesis]. FE UI, Jakarta, 2005.
- Ghozali, Imam, Analisis Multivariate dengan Proses SPSS. Edisi 3. Semarang: UNDIP, . 2005.
- Gujarati, Damodar N., Dasar-Dasar Ekonometrika, Penerbit Erlangga, 1999
- Halim, Abdul. Menejemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2001.
- Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Halim, Abdul. Menejemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2004.
- Halim, Abdul. Pengelolaan Keuangan Dearah. Yogyakarta UPP AMP YKPN, 2007.
- Haris, Syamsuddin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Pres, 2005.
- Insukindro, Mardiasmo, W.W. Dayat W.K. Jaya, B.M. Purwanto, A. Halim, J. Suprianto, A.B. Purnomo, Peranan dan Pengelolaan Keuangan Dearah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Buku I, KKD FE UGM. Yogyakarta, 1994.
- Khawalty, Inflasi dan Solusinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Kota Bandar Lampung, BPS. Kota Bandar Lampung dalam Angka, Bandar Lampung, 2013
- Listiani, Nurlia. “Faktor-faktor Determinan yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Perioade 1970-2004” Jurnal ekonomi Pembangunan Vol XIV (1). Jakarta: LIPI, 2006.

Mardiasmo dan Makhfatih, Agmad. Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang (Laporan Akhir Kerjasama Pemda Magelang dengan PAU-SE UGM), Yogyakarta, 2000.

Munir, Rinaldi, Matematika Diskrit, Penerbit Informatika, 2005.

Mustofa, Zainal. Pengantar Statistik Terapan Untuk Ekonomi. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1995.

Nanga, Muana, Makro Ekonomi. Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Raharja, Prathama, Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.

Samuelson dan Nordaus, Mikro Ekonomi. Edisi ke -14. Jakarta: Erlangga, 1997.

Setiawan, E, Metodologi Peneitian Bisnis. Cetakan Pertama. Semarang: Yayasan Widya Manggala, 2005.

Siahaan, Marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2005.

Sitepu, Rasidin Karo-Karo dan Bonar M. Sinaga, Aplikasi Model Ekonometrika, Pasca Sarjana IPB, 2006.

Sukirno, Sadono, Pengantar Makro Ekonomi. Cetakan Ke limabelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiono. Metode Peneitian Bisnis, 2005.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Widarjono, Agus, Analisis Multivariat Terapan Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, 2015.

Internet

http://sihombingruben.blogspot.com/2009/10/pengertian-dan-dampak-inflasi_8943.html

<http://syukriy.wordpress.com/2009/10/17/pokok-pokok-pengaturan-undang-undang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>